

28m 24-07-005

SOFT POWER DAN KEMITRAAN HUBUNGAN INDONESIA-PNG*

Bantarto Bandoro**

Tahun ini, 32 dua tahun yang lalu, Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Papua Nugini (PNG) sebagai bagian dari perluasan hubungan regional Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Perluasan hubungan itu bukan saja sesuatu yang imperatif untuk memperbesar raihan-raihan diplomatik Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, tetapi juga penting untuk memasukkan PNG, karena pertimbangan tertentu, sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia.

Hubungan Indonesia-PNG selama lebih dari tiga dasawarsa tidak bisa dilihat terpisah dari apa yang terjadi di dalam negeri Indonesia dan PNG dan reaksi PNG terhadap kejadian-kejadian itu. Tidak seperti hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia yang karena suatu masalah kerap kali diusulkan untuk diputuskan. Diskusi mengenai hubungan Indonesia-PNG tidak sampai kepada taraf itu. Hubungan bilateral antara kedua negara memang tidak se-stabil hubungan Indonesia dengan negara-negara tertentu lainnya di kepulauan Pasifik Selatan, karena di sana-sini dalam hubungan Indonesia-PNG masih ditemukan berbagai persoalan. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan PNG memiliki keiinginan yang sama untuk tetap menjaga agar hubungan itu tidak berkembang sampai ke taraf yang mengancam kepentingan kedua negara. Keiinginan yang sama itu antara lain dibuktikan dengan digelarnya beberapa pertemuan formal secara rutin. Upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral ke dua negara juga dilakukan melalui kunjungan timbali balik antara pejabat kedua negara. Hubungan Indonesia-PNG sejak pembukaan hubungan diplomatik tiga dasawarsa yang lalu diwarnai oleh kerjasama dan konflik yang berawal dari sebuah persoalan, meskipun konflik itu tidak sampai ke tingkat yang membahayakan hubungan bilateral kedua negara. Persoalan-persoalan ini diasumsikan muncul antara lain akibat perubahan haluan politik pemimpin PNG, pelintas batas, dan isu OPM.

Tulisan singkat ini mencoba memahami karakter hubungan Indonesia - PNG dengan mengeksplorasi apa yang menjadi kebutuhan kedua negara dalam membangun hubungan bertetangga baik. Asumsi dasar tulisan ini adalah bahwa hubungan antara Indonesia dan PNG dapat dibangun atas dasar

* Tulisan ini telah disampaikan pada Seminar "Memperkuat Kemitraan Indonesia - PNG Guna Mendukung Kepentingan Indonesia di Asia Pasifik" yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Deplu, Bogor, 19 Desember 2007

** Peneliti Senior CSIS dan Dosen Pasca Sarjana FSIP Universitas Indonesia

kemitraan, yaitu sebuah pengaturan bersama secara formal antara kedua negara yang dilandasi oleh kesepakatan untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan bersama. Bagi Indonesia, berfikir mengenai kemitraan saja tidak cukup. Kemitraan itu akan menjadi lebih berarti, lebih kuat dan mencapai sasaran hanya jika Indonesia juga berfikir mengenai kemungkinan penggunaan *soft power* dalam hubungan bilateral Indonesia-PNG.

Indonesia dan Isu Papua dalam Media PNG

Ketika Indonesia memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan PNG, Indonesia berfikir bahwa hubungan diplomatik itu akan memberi ruang yang lebih besar kepada kedua negara, khususnya Indonesia, untuk mengeksplorasi berbagai bidang kerjasama. Indonesia memahami betul bahwajika hubungan diplomatik dengan PNG ditempatkan dalam sebuah kerangka stabilitas hubungan jangka panjang, maka hubungan bilateral Indonesia-PNG akan berguna bukan hanya untuk menangkal berbagai persoalan politik - atau persoalan yang dipolitisasi- yang mungkin muncul, tetapi juga menjadi basis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bilateral dan regional.

Letak geografis yang berdekatan mengharuskan Indonesia dan PNG untuk selalu membuka jalur komunikasi baik itu pada level pemerintahan maupun masyarakat. Apa yang terjadi di PNG maupun di Indonesia atau diperbatasan kedua negara kerap diberitakan oleh surat kabar kedua negara sebagai sesuatu yang potensial mengganggu stabilitas hubungan bilateral mereka. Kedekatan geografis inilah yang kemudian mendorong kedua pemerintahan untuk mengelola persoalan perbatasan melalui sebuah perjanjian perbatasan tahun 1973 yang telah melalui beberapa kali tinjauan ulang. Pentingnya hubungan bilateral kedua negara dipertegas lagi dengan ditandatanganinya *Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation* ditandatangani tahun 1986. Perjanjian ini menjadi dasar bagi kedua negara untuk membangun saling percaya dan panduan bagi kedua pemerintahan untuk lebih memperkokoh hubungan bilateral mereka. Judul perjanjian itu memberi pesan bahwa Indonesia dan PNG perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk saling menghargai, menekankan persahabatan dan membuka kesempatan untuk bekerjasama dalam berbagai bidang. Pesan demikian merupakan pengakuan bahwa kedua negara memang menghadapi persoalan yang hanya mungkin diatasi melalui upaya - upaya bersama.

Indonesia banyak diberitakan oleh media massa PNG, terutama karena faktor Papua. Pemberitaan media massa tertentu mengenai Papua juga cukup luas. Selama periode Maret-Mei 1984 misalnya, di harian *Times of PNG* dan *Post-Courier* ditemukan 133 berita mengenai Papua dan 73 diantaranya adalah berita yang berkaitan dengan masalah pengungsi dan pelintas batas. Dari 73 berita ini, isu mengenai pengungsi Papua mendominasi berita (sekitar 40 berita). Banyaknya berita mengenai pengungsi ini adalah karena periode

tersebut merupakan awal dimulai exodus sekitar 10.000 pengungsi ke PNG akibat "operasi militer" di perbatasan Indonesia-PNG. Sebagai akibatnya, berita mengenai Indonesia menempati posisi kedua (dengan 11 berita). Dari statistik ini dapat disimpulkan bahwa selama periode 1984 ditemukan pemberitaan yang komprehensif mengenai Papua dan ini terutama disebabkan karena banyaknya kegiatan yang terjadi di perbatasan Indonesia-PNG dan pergerakan masif pengungsi Papua ke wilayah PNG. Pemberitaan media massa PNG mengenai Papua dan Indonesia yang demikian luas selama periode 1984 ini dan kenyataan bahwa terjadi pergerakan lintas batas manusia bisa jadi merupakan pertimbangan ditandatanganinya perjanjian perbatasan tahun 1986.

Pada tahun 2006 dalam periode yang sama (Maret-Mei), jumlah pemberitaan mengenai Papua dan Indonesia sama banyaknya dengan yang muncul tahun 1984. Berita di kolumn regional di kedua harian tersebut di atas banyak didominasi oleh berita mengenai demonstrasi di Freeport dan pencari suaka warga Papua ke Australia dan ketegangan hubungan Indonesia-Australia akibat kasus tersebut. Jumlah berita mengenai pelintas batas dalam periode Maret-Mei 2006 ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun 1984. Di antara berita mengenai Papua yang dimuat dalam harian *Post-Courier* (yang terbit selama 2006), ada sebuah berita dengan judul "*Rethink Papua Policy*" yang didasarkan atas relis

Kemitraan itu akan menjadi lebih berarti, lebih kuat dan mencapai sasaran hanya jika Indonesia juga berfikir mengenai kemungkinan penggunaan soft power dalam hubungan bilateral Indonesia-PNG

berita oleh pemimpin oposisi. Inti berita itu adalah usul agar kebijakan PNG mengenai non-intervensi atas masalah Papua ditinjau kembali. Himbaun ini muncul karena faktor ketakutan PNG terhadap Indonesia dan ini membuktikan sifat hubungan Indonesia-PNG yang asimetris.

Hubungan Indonesia-PNG tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi pada dasawarsa 1980an ketika Somare muncul sebagai pemimpin PNG. Ia bukan hanya dianggap sebagai "teman" Indonesia, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk hubungan bilateral PNG dengan Indonesia dua tahun setelah kemerdekaan PNG. Somare banyak dikritik oleh lawan politiknya karena kedekatannya dengan Indonesia. Kritik semacam ini juga dilancarkan oleh para pemimpin Melanesia dan rakyat PNG sendiri yang mendukung "*Melanesian brotherhood*" di Papua, meskipun pada akhirnya mereka terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia.

Media massa PNG juga menghadapi situasi yang sama ketika akan memberitakan persoalan Papua, khususnya isu pengungsi Papua yang telah menjadi fitur reguler media massa PNG sejak akhir 1970an. Yang menjadi pertanyaan adalah identitas apa yang harus diberikan oleh orang Papua yang

masuk ke PNG? Untuk menghindari kesan “melawan” Indonesia, pemerintah PNG pada waktu itu menyebut orang Papua yang masuk ke PNG sebagai “pelintas batas ilegal atau non tradisional” dan bukan pengungsi. Posisi pemerintah PNG demikian ini mendapat kecaman keras dari beberapa kalangan di PNG dan kecaman ini dimuat secara luas dalam media massa PNG, termasuk *Post-Courier*. Media massa PNG sampai batas tertentu dapat mempengaruhi publik mengenai citra Indonesia di PNG, khususnya jika berita itu menyangkut Papua dan persoalan-persoalannya. Reaksi standar yang diberikan oleh perwakilan Indonesia di PNG ketika diminta pendapat mengenai isu Papua oleh jurnalis adalah *no comment*. Anna Solomon, bekas editor *Wantok* mengungkapkan pengalamannya bahwa perwakilan Indonesia tidak pernah memberikan respon ketika ia akan mencari informasi mengenai isu Papua.

Pemerintah Indonesia sadar bahwa berita negatif mengenai Indonesia, yang terpusat pada isu Papua, tidak boleh dibiarkan hidup. Karena itu, perwakilan Indonesia di PNG berusaha sedemikian rupa untuk memperbaiki citranya sejauh itu mengenai pemberitaan Papua di media PNG. Pada dasawarsa 1990an muncul inisiatif Indonesia untuk mengundang jurnalis PNG ke beberapa acara di kedutaan Indonesia dan mengorganisir sebuah kunjungan ke wilayah Papua dan bagian-bagian lainnya dari Indonesia. Sebagai bagian dari upaya itu, pemerintah Indonesia dan PNG juga memformalisasi perjanjian-perjanjian bilateral mereka, sesuatu yang dinilai bermanfaat untuk organisasi-organisasi yang ada di PNG termasuk organisasi jurnalis. Sejak itu, berita positif mengenai Indonesia muncul secara teratur dalam media PNG. Sebuah laporan menyebutkan bahwa guru-guru PNG dari wilayah Sepik, yang berbatasan dengan Papua di sebelah utara, belajar bahasa Indonesia di Bali sebagai persiapan mereka untuk melanjutkan studi di Indonesia.

Dari liputan mengenai Indonesia dan isu Papua dalam media PNG seperti diceritakan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kalangan media memainkan peran, meskipun terbatas, dalam membentuk citra Indonesia di PNG. Bagi Indonesia media massa PNG dapat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya Indonesia menyebar-luaskan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya. Karena itu peran proaktif perwakilan Indonesia di PNG sangat dibutuhkan bukan hanya untuk merubah citra Indonesia di PNG, tetapi juga untuk meyakinkan masyarakat dan pemerintah PNG mengenai kenyataan bahwa Papua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia .

Membangun Saling Percaya

PNG merupakan negara tetangga di sebelah timur dengan perbatasan darat yang panjang dengan Indonesia. Seperti telah dikatakan di atas, hubungan bilateral Indonesia dengan PNG telah berlangsung cukup lama dan telah pula

mengalami pasang surut. Pemberitaan soal Indonesia dan Papua hampir tidak pernah absen dari liputan media masa PNG. Persoalan-persoalan yang muncul pasca pembukaan hubungan diplomatik membangunkan kesadaran pemerintah di Jakarta dan Port Moresby untuk mengatasi persoalan itu secara lebih teratur melalui mekanisme bilateral yang lebih permanen. Mekanisme tersebut adalah *Border Liason Officers Meeting*, *Border Liason Meeting*, dan *Joint Border Committee (JBC)*. Sebutan mekanisme tersebut merupakan indikasi bahwa sumber persoalan dalam hubungan Indonesia-PNG adalah masalah perbatasan seperti: lintas batas ilegal, pemulangan warga kedua negara, *illegal fishing*, batas-batas landas kontinen, aksi OPM di wilayah perbatasan, marka perbatasan, penyelesaian hak ulayat tanah di perbatasan, imigran gelap dan kejahatan lintas batas. Masalah di atas memberi implikasi bukan hanya terhadap stabilitas jangka panjang hubungan Indonesia-PNG, tetapi juga keamanan perbatasan Indonesia dengan PNG. Aspek yang disebut terakhir ini erat kaitannya dengan aktifitas kelompok separatis OPM yang memanfaatkan wilayah PNG. Seringkali anggota OPM masuk ke wilayah PNG untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia.

Pertemuan reguler pejabat kedua pemerintahan dilakukan dalam rangka membangun saling percaya. Upaya demikian penting untuk mencari kelebihan dan kekurangan dalam hubungan kedua negara. Melalui proses semacam ini, kedua pemerintahan bukan hanya akan saling menghargai, memahami pentingnya sebuah persahabatan, tetapi juga membuka ruang lebih besar untuk melakukan eksplorasi mengenai bidang-bidang yang dapat dijadikan wilayah kerjasama.

Proses membangun saling percaya ini setidaknya telah menghasilkan beberapa hasil positif misalnya dukungan pemerintah PNG terhadap integritas wilayah Indonesia. Dukungan demikian penting sebagai bukti kesungguhan pemerintah PNG untuk menghargai dan menghormati kedaulatan Indonesia, termasuk di Papua. Indonesia menghargai dukungan PNG itu dan dukungan ini memberi Indonesia kepercayaan diri yang lebih besar untuk memperluas jaringan hubungannya dengan negara-negara lainnya di kawasan Pasifik Selatan. Dalam konteks demikian Indonesia berhasil menjadi mitra dialog *Pacific Island Forum* dan menggagas berdirinya *Southwest Pacific Dialogue*. Diplomasi bilateral Indonesia terhadap PNG juga mempengaruhi PNG untuk mengambil posisi menolak dimasukkannya isu Papua dalam agenda

Diplomasi bilateral Indonesia terhadap PNG juga mempengaruhi PNG untuk mengambil posisi menolak dimasukkannya isu Papua dalam agenda pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) dan pertemuan PIF ke 14 di Port Moresby.

pertemuan *Melanesian Spearhed Group* (MSG) dan pertemuan PIF ke 14 di Port Moresby.

Melalui forum-forum semacam itu, Indonesia memiliki kesempatan dan ruang diplomatik yang lebih luas untuk meyakinkan negara-negara Pasifik Selatan bahwa mempertahankan integritas wilayah Indonesia adalah sebuah keharusan politik yang tidak dapat ditawar lagi. Hubungan Indonesia-PNG harus dilihat dalam konteks demikian dan dalam konteks regionalisme .

Aspek geostrategi dari hubungan Indonesia-PNG menjelaskan arti penting kedudukan kedua negara dalam menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman. Lingkungan demikian ini tentu memberi efek yang positif kepada warga kedua negara di wilayah perbatasan untuk melakukan interaksi dan transaksi-transaksi ekonomi dan sosial-budaya secara berkelanjutan. Stabilitas hubungan bilateral Indonesia-PNG jangka panjang pada akhirnya juga akan ditentukan oleh tingkat stabilitas hubungan antara masyarakat kedua negara di wilayah perbatasan. Ini membenarkan sebuah asumsi bahwa persoalan dalam hubungan Indonesia-PNG lebih banyak bersumber dari masalah perbatasan dan kewilayahan.

Sebagai negara yang secara geografis berdekatan, maka adalah wajar jika Indonesia dan PNG menghadapi berbagai persoalan. Adalah wajar juga jika Indonesia khususnya lebih banyak mengambil inisiatif untuk memprakarsai pertemuan-pertemuan bilateral untuk membicarakan berbagai persoalan dalam hubungan bilateral itu, khususnya jika persoalan itu berkaitan dengan Papua. Dilihat dari persepektif demikian, Indonesia sepertinya lebih berkepentingan untuk mencegah agar masalah Papua misalnya tidak menjadi komoditas politik domestik PNG. Salah satu kerangka jangka panjang yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua negara adalah *kemitraan*. Mekanisme-mekanisme tetap seperti dijelaskan di atas (yaitu: JBC dan lain-lain) dapat menjadi elemen penting dari kemitraan Indonesia-PNG.

Aspek *Soft Power*

Seperti telah dikatakan di atas, Indonesia sangat berkepentingan untuk menjaga agar masalah Papua tidak menjadi agenda politik pemerintahan PNG. Indonesia juga sadar bahwa masalah-masalah dalam hubungan Indonesia dengan PNG yang dibiarkan hidup akan sangat tidak menguntungkan kepentingan jangka panjang kedua negara, apalagi wilayah kedua negara sangat berdekatan. Indonesia dan PNG memiliki kepentingan bersama, dan kepentingan bersama inilah yang akan menjadi basis kedua negara untuk saling menghargai, menjaga persahabatan dan untuk mencari bidang-bidang kerjasama baru. Kemitraan Indonesia-PNG bisa dibangun atas dasar asumsi-asumsi demikian. Bagi Indonesia, kemitraan dengan PNG akan bermanfaat secara politis, karena kemitraan ini dapat membantu PNG memahami lebih jauh berbagai aspek penting kebijakan Indonesia dan hubungan bilateral kedua negara. Bagi PNG sendiri, kemitraan yang kuat ini juga dapat memberi

efek berarti karena oleh PNG Indonesia dilihat sebagai salah satu negara yang sangat penting perannya dalam pertumbuhan ekonomi PNG.

Bagi Indonesia, berfikir mengenai kemitraan saja tidak cukup. Kemitraan itu akan menjadi lebih berarti, lebih kuat dan mencapai sasaran hanya jika Indonesia juga berfikir mengenai kemungkinan penggunaan *soft power* dalam hubungan bilateral Indonesia-PNG. Mengabaikan kekuatan lunak dalam hubungan internasional akan beresiko biaya tinggi. Kekuatan lunak dapat menjadi alat Indonesia untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari PNG. Aplikasi kekuatan lunak Indonesia terhadap PNG bukan suatu pilihan yang tidak rasional. Ia akan menjadi penting dan relevan hanya jika Indonesia memahami betul esensi hubungannya dengan PNG dan relevansi kekuatan lunak itu dengan isu-isu spesifik yang menjadi perhatian atau berkembang di PNG, apalagi jika isu-isu itu berhubungan dengan Indonesia. Kekuatan lunak menarik untuk dibicarakan dalam konteks politik luar negeri Indonesia terhadap PNG, bukan hanya karena ia dianggap sebagai salah satu instrumen politik luar negeri, tetapi juga suatu media melalui mana pengaruh Indonesia dapat dibangun di PNG. Karena berbagai persoalan dalam hubungan Indonesia-PNG yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas wilayah perbatasan Indonesia-PNG dan Papua, maka Indonesia tentu memiliki keinginan untuk menciptakan pengaruh di PNG dengan harapan negara itu akan melakukan apa yang menjadi kepentingan Indonesia.

Diskusi mengenai aspek kekuatan lunak dalam hubungan Indonesia dengan PNG tidak akan lengkap dan mendalam kecuali kita mengetahui secara pasti jenis-jenis kekuatan lunak yang dimiliki oleh Indonesia dan memiliki prospek untuk diterapkan terhadap PNG. Berikut ini adalah perkiraan kekuatan lunak yang dimiliki Indonesia dan kemungkinan relevansinya dengan hubungan Indonesia-PNG, yaitu budaya, pendidikan, keunggulan di bidang teknik, kesehatan, kemajuan dalam bidang jurnalisme, cara penanganan masalah lingkungan, teknologi transportasi, dan ekonomi.

Indonesia harus bisa memastikan kekuatan lunak mana yang paling cocok untuk kondisi yang dihadapi oleh PNG saat ini maupun yang akan datang. Joseph Nye mengatakan bahwa keberhasilan sebuah kekuatan lunak akan sangat tergantung pada kondisi dimana kekuatan lunak itu dijalankan dan pemimpin harus membuat pilihan yang krusial mengenai jenis kekuatan lunak seperti apa yang akan digunakan. Intinya, kehandalan dan akurasi kekuatan lunak akan sangat tergantung dari bagaimana pihak yang oleh Nye disebut sebagai *the willing receivers* (dalam hal ini PNG) bereaksi terhadap kekuatan lunak tersebut. Dalam konteks demikian, reaksi PNG akan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan kekuatan lunak Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa kedekatan geografis Indonesia-PNG memberi modalitas kepada kedua negara untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Intensitas kegiatan ekonomi warga kedua negara di wilayah perbatasan sangat tinggi. Banyak warga PNG yang melintasi batas (secara legal) hanya untuk melakukan transaksi dagang dengan warga Indonesia yang berada di wilayah Papua. Dari segi ekonomi ini merupakan sebuah modalitas

yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempererat hubungan pada level pemerintahan. Manajemen pasar tradisional, sebagai bagian dari kekuatan lunak dan jika konsep ini memang ada dan dimiliki oleh Indonesia, dapat diterapkan di wilayah perbatasan dengan harapan para *trader* PNG akan semakin tertarik untuk melakukan transaksi dengan mitranya di wilayah perbatasan Indonesia. *Arena* demikian juga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan *people-to-people contact* yang memang dimungkinkan karena kedekatan faktor sosio-kultural kedua negara.

Seperti telah dibahas di atas, citra Indonesia bisa menjadi buruk akibat pemberitaan negatif masalah Papua di media cetak PNG. Jurnalis dan organisasi media dimana jurnalis itu bergabung memang independen. Indonesia jelas tidak dapat merubah independensi mereka. Tetapi Indonesia dapat membangun jaringan jurnalis di PNG sebagai bagian dari upaya penyebarluasan perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Bukan hanya itu, pemerintah Indonesia juga dapat mengambil prakarsa mempertemukan organisasi jurnalis dan media cetak Indonesia dengan organisasi jurnalis dan media cetak PNG. Proses membangun saling percaya seperti ini dapat menumbuhkan keakraban di kalangan jurnalis dan sekaligus memberikan kepada jurnalis PNG informasi yang benar mengenai perkembangan di Indonesia.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh Indonesia dan PNG adalah masalah OPM. PNG tahu bahwa wilayahnya menjadi tempat beroperasi dan berlindung para aktivis gerakan OPM dan PNG juga tahu bahwa OPM adalah sebuah gerakan yang mengancam integritas wilayah Indonesia dan karena itu keberadaannya di Indonesia dilarang. Masalah ini tidak bisa didekati secara militer, meskipun aparat keamanan Indonesia melihat isu ini sebagai isu keamanan. Pemerintah Indonesia harus melihat isu dalam perspektif kemitraan Indonesia-PNG, dalam arti bahwa membangun pandangan yang sama mengenai OPM antara Indonesia dan PNG adalah penting bagi kedua negara. Distribusi ekonomi Indonesia kepada kelompok "bakalan" anggota OPM adalah penting untuk mencegah mereka menjadi bagian utuh dari OPM. Dalam konteks demikian, kerjasama dengan PNG sangat dibutuhkan. Masalah pelintas batas illegal merupakan masalah lainnya dalam hubungan Indonesia-PNG. Indonesia yang dapat didekati melalui kekuatan lunak.

Penerapan kekuatan lunak Indonesia terhadap PNG bisa dipikirkan sebagai pendekatan untuk merubah elemen-elemen anti Indonesia di PNG atau mempengaruhi pemerintah PNG, di bawah pemerintahan siapapun, untuk selalu mengambil sikap mendukung integritas wilayah Indonesia. Efek dari kekuatan lunak itu sebagian besar akan tergantung pada penerimaan PNG dan elemen-elemen di dalamnya. Dengan kata lain, keberhasilan kekuatan lunak akan sangat ditentukan oleh bagaimana persepsi PNG sendiri mengenai Indonesia. Kekuatan lunak itu bersumber bukan dari propaganda politik Indonesia terhadap PNG tetapi bersumber dari kepekaan Indonesia yang lebih besar terhadap opini-opini tentang dirinya yang berkembang di PNG dan sikap

pemerintah PNG mengenai masalah: perbatasan, OPM dan Papua dan pelintas batas.

Referensi

- Patrick Matbob dan Evagelia Papoiutski, "West Papuan "independence" and the Papuan New Guinea Press," *Pacific Journalism Review* 12 (2) , 2006.
- Joseph S. Nye , "Propaganda Isn't the Way: Soft Power" *The International Herald Tribune*, Januari 10, 2003
- James Hohmann , "Foreign Policy as Three-dimensional, " *The Stanford Daily*, February 15, 2006 / <http://daily.stanford.edu>.
- Republika*, 20 Agustus 2005.
- Joseph S. Nye, "The Benefits of Soft power." <http://hbswk.hbs.edu/archive/4290.html>
- John Connel, *Papua New Guinea. The Struggle for Development*. Routledge
- Peter Elder , *Papua/Irian News Reports in Papua New Guinea, April 1996 - August 2001*.
- Keterangan Pers Presiden Tentang Kunjungan ke AS, Washington, Kamis, 26 Mei 2005.
- Papua New Guinea, Fiji, and Indonesia: Asia-Pacific Coral Reef Program, <http://www.wcs.org/international/marine>.
- "PNG Interested In Forging Closer Economic Ties With Indonesia," *The Jakarta Post*, 23 Februari 2004.
- "Membangun Kawasan Perbatasan RI-PNG Menegaskan Kembali Keutuhan NKRI," *Kompas*, 7 Juli 2004.
- "Pelintas Batas dari PNG Meningkat", *Kompas*, 29 Agustus 2005.
- Mitra Dagang Indonesia dengan Papua Nugini, *Business News*, 17 September 2007.
- "Pelintas Batas Tradisional Masalah Krusial RI-PNG," *Suara Pembaruan*, 25 Juli 2007.
- "Indonesia, PNG Ready To Open Boader Road," *The Jakarta Post*, 20 Februari, 2007.

